

Sistem Manajemen Administrasi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Operasional Perhubungan Darat Di Kabupaten Sorong

Muhammad Akbar¹, Arie Purnomo²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : a) Untuk mengetahui sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. c) Mengetahui upaya pemecahan masalah terhadap hambatan yang terjadi dalam sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan utama yang dihadapi di Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Sorong adalah lambannya reformasi di tingkat birokrasi pemerintahan dibanding dengan bidang lainnya. Ditinjau dari sisi internal birokrasi, pemerintahan di daerah menghadapi berbagai masalah pokok diantaranya : a) Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin di kalangan PNS baik dari kehadiran di tempat kerja, motivasi kerja, dedikasi, maupun tanggung jawab ; b) Masih rendahnya kinerja aparatur (PNS) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; c) Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan, baik di ibukota, Distrik, maupun Kelurahan; d) Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) yang belum memadai; e) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNS; f) Rendahnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan; g) Rendahnya kualitas SDM aparatur; h) Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang belum efektif; i) Masih rendahnya intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan serta audit internal dan eksternal .

Kata Kunci : Sistem Manajemen, Administrasi, Operasional Perhubungan Darat

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sektor penting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan transportasi menentukan keberhasilan pembangunan nasional/daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi transportasi yaitu untuk membangun jejaring nasional, regional, dan lokal, serta memfasilitasi berbagai kegiatan dan interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks perencanaan kota dan wilayah, transportasi berperan dalam memacu pertumbuhan suatu kota dan wilayah, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang investasi bagi kawasan-kawasan tertinggal dan terisolasi.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menerobos isolasi di Papua melalui pembangunan transportasi jalan darat, udara dan laut. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam merancang

pembangunan infrastruktur transportasi. Pertama adalah *community based infrastructure development*, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi untuk menjangkau masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Itu sebabnya, walaupun biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal, pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan sungai) terus dilakukan di pegunungan tengah yang medannya sangat sulit. Pegunungan tengah adalah kawasan di mana sebagian besar penduduk Papua bermukim.

Pembangunan transportasi khususnya transportasi darat di Kabupaten Sorong telah memadai, di tandai dengan tersedianya fasilitas dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat terdiri dari jaringan jalan, terminal, serta system. Transportasi jalan adalah urat nadi dalam sistem prasarana transportasi. Jalan memiliki peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian pembangunan jalan dikembangkan melalui pendekatan pembangunan kota/wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, memperkuat persatuan, memantapkan hankam, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. Transportasi darat khususnya di Kabupaten Sorong memegang peranan penting dalam proses manajemen rantai pasok, kegiatan pengiriman ke titik-titik distribusi yang telah ditetapkan adalah pekerjaan yang memerlukan perencanaan, koordinasi, dan akurasi yang tinggi. Kesalahan proses manajemen transportasi bisa memberikan berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan dan pada akhirnya akan membuat sia-sia semua tahapan yang telah dikerjakan. Bahkan, kesalahan proses transportasi berpotensi menjadi faktor penyebab hilangnya peluang bisnis perusahaan. Misalnya kesalahan dalam proses KIR.

Nur Iman Abdul Karim, dkk (2017) menjelaskan bahwa, Sistem ketenagakerjaan pada dasarnya bergantung pada adanya mekanisme penegakan hukum yang bersifat mempengaruhi secara memadai. Kerja paksa dan perdagangan orang adalah kejahatan yang seringkali dilakukan dengan pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penegakan terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan serta undang-undang hukum pidana. Sistem ketenagakerjaan memiliki keleluasaan untuk tidak menerapkan hukuman, kasus-kasus kerja paksa pada umumnya memerlukan respon-respon penegakan hukum dan pidana yang cepat.

Penelitian ini bertujuan : a) Untuk mengetahui sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem manajemen administrasi Dinas

Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. c) Mengetahui upaya pemecahan masalah terhadap hambatan yang terjadi dalam sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memperkecil masalah yang muncul, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya serta menganalisa penulisan ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan Penelitian kepustakaan (Library Research). Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut : 1) Tahapan reduksi data; Dalam tahapan ini peneliti memeriksa seluruh data yang dihipun melalui Observasi, wawancara, dan studi dokumen tersebut untuk dipilih berdasarkan sub-sub pokok bahasan sesuai dengan maksud penelitian. 2) Tahap penyajian; Dalam tahap ini peneliti menyajikan atau menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. 3) Tahap kesimpulan; Langkah ini untuk menafsirkan atau memaknai hasil penelitian tersebut yang dimaksudkan untuk menarik kesimpulan terhadap data yang telah dilakukan dalam proses penelitian,(Bagong Suyanto & Sutinah;2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengelolaan Sistem Manajemen Administrasi

Peranan pengelolaan sistem manajemen administrasi pada hakikatnya dibagi menjadi tiga bagian atau tiga faktor yang sangat penting dalam menunjang proses penyelenggaraan pengembangan pemerintahan di daerah antara lain: 1) Asas-asas dalam proses administrasi; Proses administrasi pada dinas perhubungan darat sebagai subspecies administrasi negara secara mutatis, mutandis dalam pendekatan guna tercapainya tata tertib dalam bidang sasarannya mengikuti asas-asas sesuai dengan yang dipolakan dalam administrasi negara. 2) Hubungan Administrasi dan Pemerintahan; Di dalam ruang lingkup gerak administrasi Dinas perhubungan darat, merupakan komponen yang paling menentukan dan berfungsi sebagai penggerak/subyek administrasi Dinas perhubungan darat, karena kemampuannya yang bersifat khusus, sebagai

lembaga-lembaga kenegaraan yang sehingga memperoleh pendelegasian kewenangan dari lembaga pemerintahan di atasnya. 3) Ruang lingkup sasaran.

Mamfaat Sistem Manajemen Administrasi Dalam Pengelolaan

Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai. Oleh sebab itu tugas seorang pimpinan untuk menentukan kebutuhan dan keinginan akan retribusi daerah adalah mengumpulkan dan mengorganisasikan, mengarahkan keinginan-keinginan tersebut secara efisien dan efektif dan merupakan tugas yang tidak mudah keberhasilan itu tercapai begitu saja sehingga tujuan yang pasti harus ditetapkan dengan jelas dan tepat, serta metode pencapaian harus direncanakan, dilaksanakan sebagaimana mestinya disamping itu tugas tersebut bersifat berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan daerah akan pendapatan sehingga terus menerus dapat meningkat dalam arti prinsip-prinsip manajemen yang sehat adalah pencakup banyak faktor yang berhubungan dengan semua kegiatan kepemimpinan.

Pelaksanaan Mengelolaan Manajemen

Menurut Sutikno (2003:13), mengatakan tujuan organisasi adalah : suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan tujuannya dan sebagaimana pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang antara lain. 1) Hasil akhir yang diinginkan, 2) Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang diarahkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup; penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada.

Pekerja dianggap sebagai Barang Dagangan

Pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Anggapan ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain pekerja tidak mungkin menjual daya atau tenaganya. Bahkan dalam pemanfaatan SDM ini, pekerja harus tunduk kepada beberapa hal yang ada diluar dirinya, seperti disiplin dan kekuasaan majikannya, pegawai lain, penggunaan dan pengembangan pegawai, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Pekerja dianggap sebagai SDM

Keadaan ini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari organisasi, dan juga penghasilan pekerja itu sendiri. Selain pemborosan, juga faktor-faktor yang berkaitan dengan kelalaian pekerja, misalnya terjadi kecelakaan serta biaya pengembangan kemampuan atau kompensasi SDM.

Pekerja dianggap sebagai Mesin

Konsepsi SDM yang demikian tidak ubahnya menganggap bahwa pekerja itu sama dengan barang dagangan. Karena SDM dianggap seperti mesin, maka penggunaan pekerja tersebut diusahakan sama seperti mesin dengan mengutamakan produktivitasnya tanpa memandang segi-segi kemanusiaan seperti; pikiran, perasaan, dan tata nilai manusia lainnya.

Pekerja dianggap sebagai Manusia

Kelompok ini memandang bahwa dalam manajemen tidak semata-mata berdasar atas rasa kemanusiaan saja, tetapi secara ilmiah dapat dilakukan observasi terhadap pekerja. Selain itu pekerja mempunyai sistem saraf dan alat perasa lainnya sebagaimana manusia lainnya, dan juga ingin menempati kedudukan sosial yang layak dalam masyarakat.

Pekerja dianggap sebagai Partner

Konsepsi ini pada prinsipnya ingin menjembatani perbedaan atau pertentangan antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Disini ditekankan bahwa pemilik usaha tidak mungkin menjalankan sendiri usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja, demikian pula sebaliknya pekerja tidak bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan bilamana tidak ada pemilik usaha.

Pekerja Sebagai Pelayan Publik

Pelayanan publik adalah target dari semua proses manajemen publik maka keterlibatan publik dalam proses manajemen publik sudah merupakan *condition sinequanom* (*sebuah kondisi keharusan*). Orientasi publik akan lebih memudahkan pegawai publik dalam menjalankan fungsinya oleh karena semakin banyak melibatkan politik, maka semakin kecil tingkat resistensi mereka terhadap organisasi publik.

Kendala yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi di Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Sorong adalah lambannya reformasi di tingkat birokrasi pemerintahan dibanding dengan bidang lainnya. Ditinjau dari sisi internal birokrasi, pemerintahan di daerah menghadapi berbagai masalah pokok diantaranya : a) Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin di kalangan PNS baik dari kehadiran di tempat kerja, motivasi kerja, dedikasi, maupun tanggung jawab ; b) Masih rendahnya kinerja aparatur (PNS) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; c) Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan, baik di ibukota, Distrik, maupun Kelurahan; d) Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (menajemen) yang belum memadai; e) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNS; f) Rendahnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan; g) Rendahnya kualitas SDM aparatur; h) Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang belum efektif; i) Masih rendahnya intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan serta audit internal dan eksternal .

Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mencapai sasaran pemerintahan yang baik, berwibawa, professional dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai antara lain, yaitu: 1) Berkurangnya pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur melalui penegakan sanksi yang tegas terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai; 2) Meningkatnya kinerja aparatur (PNS) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ; 3) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai pada semua jenjang pemerintahan di Kabupaten Sorong; 4) Tertatanya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (menajemen) di daerah ; 5) Meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil; 6) Meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan; 7) Meningkatnya kualitas SDM aparatur; 8) Efektifnya sistem pengawasan terhadap kinerja aparatur; 9) Meningkatnya intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan serta audit internal dan eksternal .

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa : 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan instansi. 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai perubahan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. 5) Bahwa setiap pegawai harus mengikuti segala aturan main yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 29 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Abidin, Said Zainal, 2008, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*,: Suara Bebas. Jakarta
- Amstrong, Michael, 1990, *Manajemen Sumber Daya Manusia Seri Pedoman Manajemen*, (Alih Bahasa : Sofyan dan Haryanto),: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Arsyad, Lincoln. 1996. *Analisis Potensi Ekonomi Daerah*, Program Pemses,: BPFE. Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*,: BPFE. Yogyakarta
- Bateson, John E.G. 1991, *Managing Services Marketing*, Second Edition, Dryden Press. Orlando
- Brannen, Julia, 2005, *Memadu Metode Penelitian–Kualitatif & Kuantitatif*,: Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Claggett, 1991, *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern* (Alih Bahasa : Djamil),: Penerbit Erlangga. Jakarta
- Craig & Grant, 2002, *Manajemen Strategi* (Alih Bahasa : Tjipto Wardoyo), : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Dessler, Gerry, 1997, *Manajemen Personalia* (ALih Bahasa : Darma), : Penerbit Erlangga. Jakarta

Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*,: Pustaka Cakra. Surakarta

Karim, N. I. A., Amiruddin, A., & Ena, N. (2017). ANALISIS ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA HIBURAN MALAM DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL KOTA SORONG. *Gradual*, 6(2), 1-11.